

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup suatu negara, yang biasanya diukur melalui tinggi rendahnya pendapatan perkapita. Pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup perubahan struktur ekonomi dan sosial, serta bertujuan untuk menekan tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan menurunkan tingkat pengangguran (Todaro & Smith, 2020:233). Pembangunan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan. Hasyim (2016), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian yang tercermin dari meningkatnya pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai distribusi pendapatan yang lebih merata sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ketimpangan antar daerah masih menjadi salah satu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketimpangan wilayah akan muncul ketika pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan (Safitri et al., 2021:142).

Negara Indonesia terdiri dari 38 provinsi, yang memiliki karakteristik berbeda. Perbedaan tersebut terlihat dari distribusi sumber daya alam, kondisi sosial, struktur ekonomi, serta karakteristik lingkungan di setiap provinsi. Kondisi ini akan menghambat pemerataan pembangunan ekonomi karena kegiatan ekonomi cenderung berpusat pada daerah yang memiliki sumber daya alam

melimpah, sehingga memicu ketimpangan pembangunan bagi daerah yang memiliki sumber daya terbatas (Raharjo & Wirahayu, 2025:947). Menurut Sjafrizal (2018:208), ketimpangan antar wilayah dipengaruhi oleh sumber daya alam yang berbeda dan kondisi demografis termasuk tenaga kerja, perbedaan kapasitas fiskal pemerintah daerah, konsentrasi kegiatan ekonomi, serta mobilitas barang dan jasa antar daerah. Oleh Karena itu, tidak mengherankan bahwa biasanya ada daerah maju (*developed region*) dan daerah terbelakang (*underdeveloped region*), yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat serta bagaimana pemerintah daerah membuat kebijakan pembangunan di masing-masing daerah (Pratiwi, 2021:132).

Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia juga dapat dilihat melalui perbandingan tingkat ketimpangan antar provinsi di Pulau Jawa. Berdasarkan data terbaru tahun 2024, beberapa provinsi di Pulau Jawa menunjukkan tingkat ketimpangan yang cukup tinggi, seperti Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,423, Provinsi Jawa Barat sebesar 0,421, Provinsi Jawa Timur sebesar 0,370, Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,367, dan Provinsi Banten sebesar 0,353 (Badan Pusat Statistik, 2025a). Namun demikian, Provinsi D.I Yogyakarta justru memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan provinsi-provinsi tersebut, yaitu sebesar 0,435, nilai ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 0,388 (Sigit, 2024).

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai daerah dengan perkembangan sektor pendidikan, pariwisata, dan budaya yang cukup pesat, serta mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir, namun masih menghadapi permasalahan ketimpangan pembangunan yang relatif lebih serius dibandingkan daerah lain.

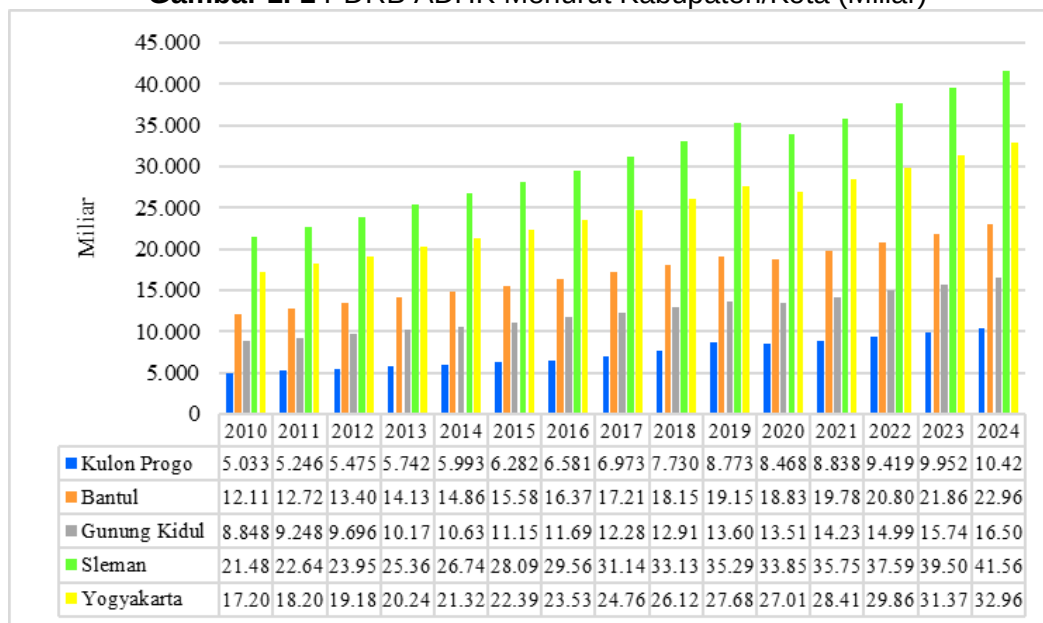
Ketimpangan tersebut dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan serta berpotensi memicu kecemburuan sosial antara daerah yang tertinggal dan daerah yang lebih maju. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan hasil pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, perbedaan kapasitas ekonomi antar kabupaten/kota masih terlihat cukup jelas. Perbedaan ini tercermin dari variasi PDRB per kapita, kemampuan fiskal daerah, kualitas sumber daya manusia, dan distribusi penduduk. Perbedaan karakteristik antarwilayah juga terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri atas empat kabupaten, yaitu kabupaten Sleman, kabupaten Bantul, kabupaten Kulon Progo, dan kabupaten Gunungkidul dan satu kota, yaitu kota Yogyakarta dengan struktur ekonomi yang tidak sama. Terdapat perbedaan dalam distribusi sumber daya alam, kondisi sosial, struktur ekonomi, serta karakteristik lingkungan di setiap daerah. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman cenderung memiliki konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi, didukung oleh sektor pendidikan, perdagangan, dan jasa. Sementara itu, beberapa wilayah lain masih menghadapi keterbatasan dalam pengembangan sektor ekonomi serta infrastruktur pendukung. Perbedaan struktur ekonomi tersebut berpotensi menimbulkan disparitas pembangunan antar kabupaten/kota.

Pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dinilai dari tingkat pertumbuhan serta besarnya pendapatan yang dihasilkan wilayah tersebut, yang tercermin dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Salah satu indikasi adanya ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah dapat dilihat dari perbedaan

nilai PDRB pada masing-masing daerah (Azim et al., 2022:4). Namun demikian, untuk mengukur tingkat ketimpangan secara lebih akurat diperlukan suatu indeks pengukuran. Salah satu yang digunakan adalah Indeks Williamson, karena mampu mengukur ketimpangan antarwilayah secara lebih rinci serta sensitif terhadap distribusi pendapatan (Alfons et al., 2024). Dalam penelitian ini, PDRB digunakan sebagai data pembentuk variabel dependen, yaitu ketimpangan pembangunan ekonomi, bukan sebagai variabel utama.

Wilayah yang mampu menghasilkan PDRB tinggi umumnya menunjukkan tingkat pembangunan dan produktivitas yang lebih baik. Akan tetapi, tingginya nilai PDRB pada suatu wilayah belum tentu mencerminkan pemerataan pembangunan antar daerah (Handoko et al., 2020:2). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan PDRB diharapkan mampu mempercepat terbentuknya struktur perekonomian yang seimbang dan dinamis, dengan ciri sektor industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh, serta keseimbangan pertumbuhan antar sektor. Berikut disajikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagaimana disajikan pada gambar 1.1 dihalaman berikutnya.

Gambar 1. 1 PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota (Miliar)

Sumber: BPS Provinsi DI Yogyakarta (2026)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa berdasarkan data tahun 2010-2024, seluruh kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan PDRB per kapita dari tahun ke tahun. Namun demikian, peningkatan tersebut tidak diikuti dengan pemerataan antar wilayah. Kabupaten Sleman secara konsisten mencatat nilai PDRB per kapita tertinggi, yaitu sebesar Rp41.560 miliar pada tahun 2024, diikuti oleh Kota Yogyakarta dengan tren pertumbuhan yang relatif stabil. Sementara itu, Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul cenderung berada pada kelompok dengan nilai PDRB per kapita yang lebih rendah, meskipun juga mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kondisi ini menunjukkan adanya karakteristik ketimpangan pembangunan ekonomi yang bersifat terpusat, di mana aktivitas ekonomi lebih terkonsentrasi pada wilayah tertentu, khususnya daerah perkotaan seperti Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Sebaliknya, wilayah lain yang relatif kurang berkembang masih menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi dan infrastruktur pendukung. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi

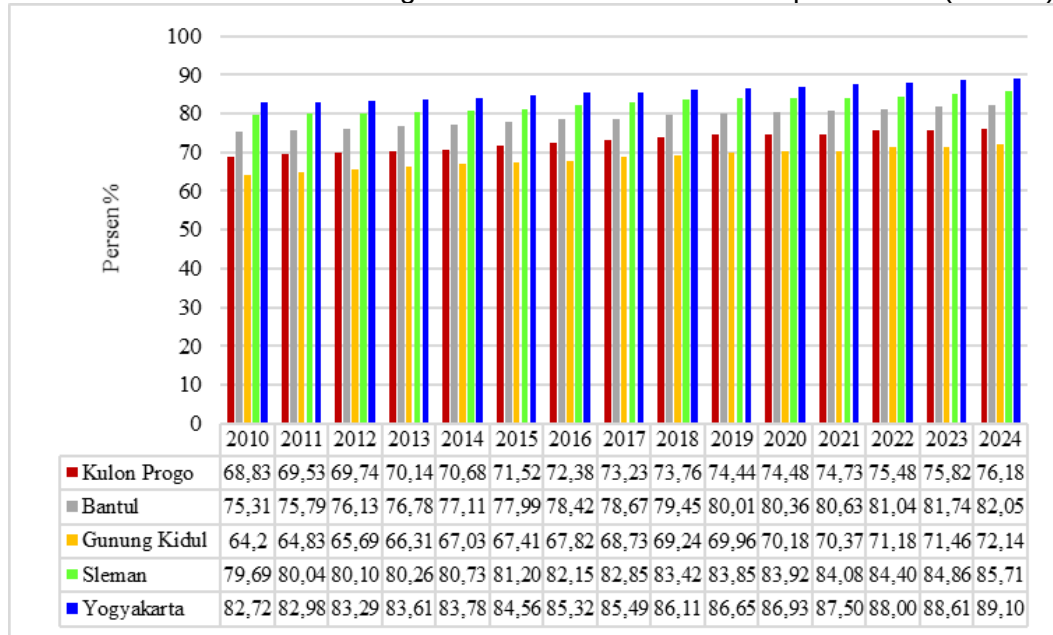
cenderung tidak merata dan membentuk pola kesenjangan yang persisten antar wilayah, sehingga mengindikasikan adanya ketimpangan pembangunan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Meningkatnya ketimpangan pembangunan antarwilayah juga dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi, sosial, dan politik, seperti inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya serta kesenjangan pendapatan antar daerah (Handoko et al., 2020:3). Secara teoritis, daerah yang berkembang pesat diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan melalui efek penyebaran (*spread effect*) ke wilayah sekitarnya. Namun, dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi seringkali justru terkonsentrasi di daerah yang telah maju, sehingga memperbesar ketimpangan antarwilayah. Hal ini sejalan dengan teori Gunnar Myrdal yang menyatakan bahwa dalam proses pembangunan ekonomi, mekanisme *backwash effect* cenderung lebih dominan dibandingkan *spread effect*. Wilayah yang lebih maju akan menarik modal, investasi, tenaga kerja terampil, serta aktivitas ekonomi dari wilayah yang tertinggal. Apabila efek penyedotan ini lebih kuat daripada efek penyebaran, maka ketimpangan antarwilayah akan semakin meningkat (Priatna et al., 2025:25).

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi. IPM mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui tiga aspek yaitu, Aspek kesehatan diukur dengan angka harapan hidup, aspek pendidikan diukur melalui angka harapan lama pendidikan, dan rata-rata lama pendidikan. Aspek standar hidup yang layak diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita yang disesuaikan (Endang, 2022:357). Dengan demikian, IPM tidak hanya menggambarkan pertumbuhan

ekonomi tetapi juga kualitas pembangunan manusia secara menyeluruh. Ketimpangan IPM di Provinsi D.I Yogyakarta terlihat dari perbedaan capaian antara wilayah sisi utara DIY (Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta) dengan sisi selatan DIY (Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo). Nilai IPM wilayah utara relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah selatan, yang menunjukkan adanya ketimpangan kualitas pembangunan manusia antarwilayah (Sigit, 2024). Berikut disajikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi DI Yogyakarta periode 2010-2024 pada gambar 1.2 dibawah.

Gambar 1. 2 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota (Persen)



Sumber: BPS Provinsi DI Yogyakarta (2026)

Gambar 1.2 memperlihatkan tren peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dari tahun ke tahun. Kota Yogyakarta secara konsisten mencatat nilai IPM tertinggi, meningkat dari 82,72 pada tahun 2010 menjadi 89,10 pada tahun 2024, diikuti oleh Kabupaten Sleman yang juga menunjukkan capaian relatif tinggi dan stabil. Sebaliknya, Kabupaten Gunungkidul memiliki nilai IPM terendah dibandingkan daerah lainnya,

yaitu sebesar 72,14 pada tahun 2024, meskipun tetap mengalami peningkatan selama periode pengamatan.

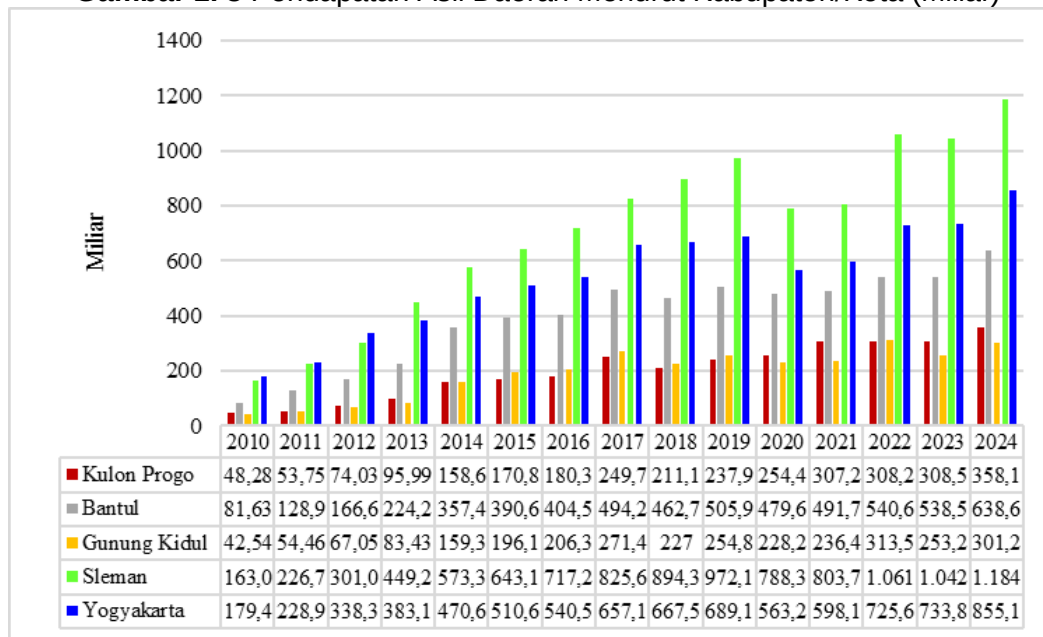
Secara teoritis, peningkatan IPM dapat menurunkan ketimpangan. Namun, dalam praktiknya, peningkatan kualitas manusia seringkali terkonsentrasi di wilayah yang lebih maju, sehingga kesenjangan antarwilayah tetap terjadi. Perbedaan capaian IPM tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia antar daerah belum merata. Kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi memiliki keunggulan dalam pembangunan karena didukung oleh fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur yang lebih memadai. Selain itu, aktivitas perdagangan, jasa, dan pariwisata yang berkembang turut mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul masih menghadapi keterbatasan akses serta tantangan kondisi geografis yang memengaruhi pemerataan fasilitas dan layanan publik.

Peningkatan IPM mencerminkan perbaikan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, sehingga mendorong peningkatan produktivitas dan membuka peluang kerja dengan pendapatan yang lebih tinggi (Muslinawati & Sutrisno, 2024:1560). Hal ini sejalan dengan teori *human capital* yang menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Juliana & Soelistyo, 2019:294). Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia akan berdampak pada kenaikan produktivitas, pendapatan, serta PDRB. Sebaliknya, IPM yang rendah mencerminkan kualitas SDM yang belum optimal, sehingga produktivitas dan pendapatan masyarakat cenderung

lebih rendah. Oleh karena itu, perbedaan tingkat IPM antar daerah dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi.

Faktor lain yang tidak kalah penting dalam memengaruhi ketimpangan pembangunan antarwilayah adalah kapasitas fiskal daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri sangat ditentukan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota. PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari potensi ekonomi wilayah itu sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah (Sholeh et al., 2025). Besarnya PAD mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola potensi ekonomi lokal, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sumber daya dan tingkat aktivitas ekonomi (Juliana & Soelistyo, 2019:295).

PAD dipilih karena mencerminkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin besar PAD, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, jika PAD rendah, pemerintah daerah akan mengalami keterbatasan dalam penyediaan fasilitas umum dan cenderung bergantung pada pemerintah pusat. Ketergantungan ini dapat menghambat kemandirian daerah serta mengurangi optimalisasi potensi ekonomi lokal. Oleh karena itu, perbedaan kapasitas fiskal antar daerah diduga turut memengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi (Finuliyah & Khusaini, 2022:19). Berikut disajikan PAD antar kabupaten/kota di Provinsi DIY, sebagaimana disajikan pada gambar dihalaman berikutnya.

Gambar 1. 3 Pendapatan Asli Daerah Menurut Kabupaten/Kota (Miliar)

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2026)

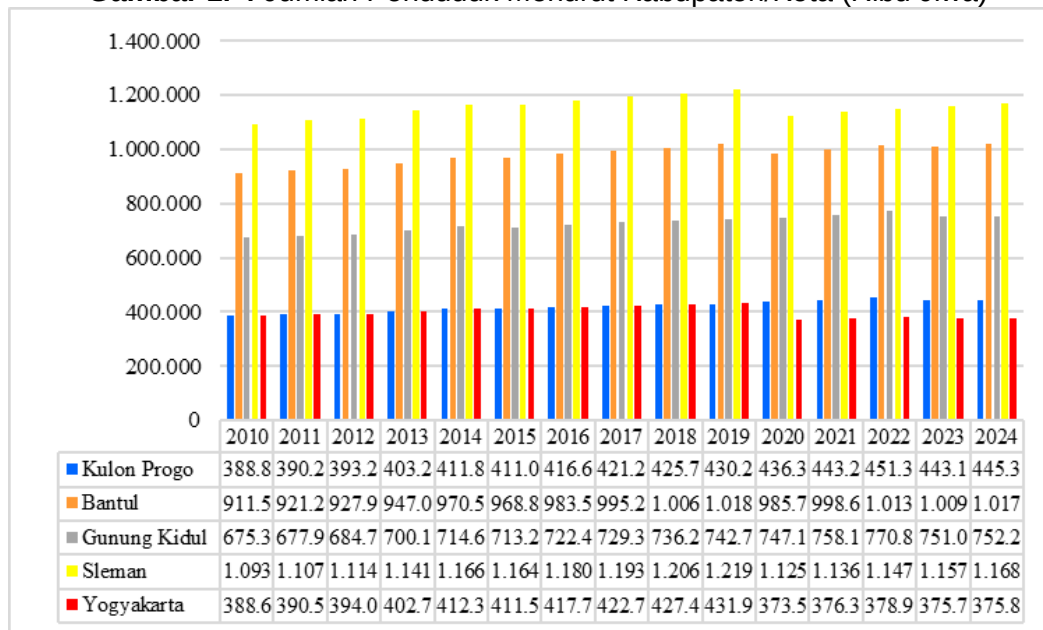
Gambar 1.3 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Kabupaten Sleman tercatat memiliki PAD tertinggi, meningkat dari Rp163,05 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp1.184,12 miliar pada tahun 2024. Kota Yogyakarta juga menunjukkan capaian PAD yang relatif tinggi, yaitu sebesar Rp855,10 miliar. Sebaliknya, Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo memiliki PAD yang jauh lebih rendah, masing-masing sebesar Rp301,19 miliar dan Rp358,09 miliar pada tahun 2024.

Perbedaan tersebut mencerminkan bahwa kapasitas fiskal antar daerah belum merata, yang dipengaruhi oleh variasi aktivitas ekonomi dan potensi wilayah. Daerah dengan aktivitas ekonomi yang lebih berkembang, seperti Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, cenderung mampu menghasilkan PAD yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Namun demikian, tingginya PAD tidak serta-merta menjamin pemerataan pembangunan. PAD yang besar belum tentu langsung menurunkan ketimpangan apabila pemanfaatannya belum optimal

dan masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Sebaliknya, daerah dengan PAD yang rendah cenderung menghadapi keterbatasan dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik, sehingga berpotensi memperbesar kesenjangan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, perbedaan kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu faktor penting yang diduga memengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta.

Jumlah penduduk merupakan faktor lain yang berperan dalam dinamika pembangunan antarwilayah selain Indeks Pembangunan Manusia dan kapasitas fiskal yang tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah. Jumlah penduduk berperan penting dalam aktivitas ekonomi dan proses pembangunan karena berfungsi sebagai tenaga kerja, tenaga profesional, serta wirausahawan yang menggerakkan kegiatan ekonomi di suatu daerah. Selain itu, besarnya jumlah penduduk juga dapat mencerminkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan masing-masing wilayah (Zasriati, 2020:121).

Jumlah penduduk yang besar tidak selalu menimbulkan permasalahan apabila diimbangi dengan tingkat produktivitas yang tinggi, sehingga tidak memicu ketimpangan. Namun, permasalahan akan muncul apabila pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diikuti dengan peningkatan kualitas dan kesempatan kerja, yang ditandai dengan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Kondisi ini pada akhirnya dapat memperbesar ketimpangan pembangunan antarwilayah (Juliana & Soelistyo, 2019:295). Untuk melihat kondisi jumlah penduduk antar kabupaten/kota di Provinsi DI Yogyakarta, data jumlah penduduk disajikan pada gambar dihalaman berikutnya.

Gambar 1. 4 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)

Sumber: BPS Provinsi DI Yogyakarta (2026)

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa jumlah penduduk antar kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Kabupaten Sleman merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu sekitar 1.168,5 ribu jiwa pada tahun 2024, diikuti oleh Kabupaten Bantul dengan sekitar 1.017,8 ribu jiwa. Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul memiliki jumlah penduduk sekitar 740 hingga 752,2 ribu jiwa, dan Kabupaten Kulon Progo sekitar 445,3 ribu jiwa. Kota Yogyakarta tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sekitar 375,8 ribu jiwa. Jumlah penduduk yang besar dapat mendorong aktivitas ekonomi, namun juga meningkatkan tekanan terhadap penyediaan fasilitas publik dan pemerataan pembangunan.

Perbedaan jumlah penduduk tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan distribusi penduduk antarwilayah. Namun demikian, jumlah penduduk yang lebih kecil tidak selalu mencerminkan rendahnya aktivitas ekonomi. Kota Yogyakarta, misalnya, meskipun memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan kabupaten lainnya, tetap menjadi pusat kegiatan

ekonomi, pendidikan, perdagangan, dan pariwisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa karakteristik wilayah, seperti struktur ekonomi dan fungsi kawasan, turut memengaruhi perkembangan ekonomi masing-masing daerah. Oleh karena itu, perbedaan jumlah dan distribusi penduduk berpotensi menimbulkan perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta.

Ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota masih terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan jumlah penduduk secara teoritis memiliki keterkaitan dengan kondisi tersebut. Peningkatan IPM dan PAD di daerah seperti Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman belum sepenuhnya mampu mengurangi kesenjangan pembangunan dengan wilayah lain seperti Kabupaten Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo. Selain itu, perbedaan jumlah penduduk antar daerah juga mencerminkan adanya variasi potensi ekonomi serta kebutuhan pembangunan di masing-masing daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan indikator pembangunan belum tentu diikuti oleh pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian untuk menganalisis pengaruh IPM, PAD, dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi guna mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesenjangan antar wilayah.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara IPM, PAD dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Penelitian oleh Juliana & Soelistyo (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif namun tidak signifikan, sementara PAD dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan. Artinya, peningkatan PAD dan jumlah penduduk cenderung memperbesar ketimpangan pembangunan ekonomi, sedangkan peningkatan IPM belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan

dalam menurunkan ketimpangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Finuliyah & Khusaini (2022) yang menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap ketimpangan antar wilayah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Didia (2016) menunjukkan bahwa IPM dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Azim et al., (2022) menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia justru berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan, yang berarti peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Raharti et al., (2021) menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan atau gap pada penelitian terkait pengaruh IPM, PAD, dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Temuan yang beragam menunjukkan bahwa hubungan antar variabel belum sepenuhnya konsisten, sehingga perlu dilakukan pengujian kembali dengan wilayah dan periode penelitian yang berbeda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi dan periode penelitian, yaitu fokus pada kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2010–2024, yang belum banyak dikaji secara spesifik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur terkait ketimpangan pembangunan ekonomi, khususnya dengan menggunakan pendekatan Indeks Williamson. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh IPM, PAD, dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, hasil penelitian

ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini merumuskan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (X1) berpengaruh secara parsial terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2010-2024?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (X2) berpengaruh secara parsial terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2010-2024?
3. Apakah jumlah penduduk (X3) berpengaruh secara parsial terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2010-2024?
4. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), dan jumlah penduduk (X3) berpengaruh secara simultan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2010-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun berdasarkan perumusan masalah penelitian diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (X1) secara parsial terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2010-2024

2. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X2) secara parsial terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2010-2024
3. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk (X3) secara parsial terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2010-2024
4. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), dan jumlah penduduk (X3) secara simultan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2010-2024

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan pada bidang ekonomi terutama mengenai ketimpangan pembangunan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta, memberi kontribusi dalam menambah ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sumber informasi dan bahan rekomendasi kebijakan dalam upaya mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah.
- 2) Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dan bahan pengembangan kajian ilmiah terkait ketimpangan

pembangunan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di wilayah lain.

- 3) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga dapat memperluas pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemerataan pembangunan serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan yang lebih berkeadilan dan merata.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa batasan, antara lain:

1. Penelitian ini hanya terfokus pada kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari lima daerah, yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
2. Variabel independen penelitian ini terbatas, hanya menggunakan 3 variabel bebas. Seperti Indeks Pembangunan Manusia (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), Jumlah Penduduk (X3)
3. Analisis terbatas pada periode 2010-2024 dikarenakan, ketersediaan data yang lengkap pada rentang waktu tersebut. Selain itu, periode ini cukup panjang untuk melihat perkembangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta serta dapat menggambarkan kondisi ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah.
4. Penggunaan data sekunder dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).